

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN KONSERVASI BANGUNAN DI KAWASAN KOTA LAMA BANYUMAS

Oleh:

MUHAMMAD RAFLY FADILAH

E1A019016

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang memiliki warisan budaya yang berwujud dan tidak berwujud. Salah satu warisan budaya yang berwujud yaitu bangunan. Dewasa ini bangunan sejarah banyak yang dihancurkan untuk dibangun menjadi bangunan modern sehingga keberadaannya harus dipertahankan dan dilindungi secara hukum. Kebijakan konservasi bangunan bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Cagar Budaya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kebijakan hukum konservasi bangunan di Kawasan Kota Lama Banyumas diwujudkan melalui penetapan Kota Lama Banyumas sebagai kawasan lindung, kegiatan inventarisasi bangunan di Kota Lama Banyumas, penetapan Cagar Budaya di Kota Lama Banyumas dan pendanaan pelestarian Cagar Budaya di Kota Lama Banyumas. Bangunan bersejarah di Kota Lama Banyumas belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya karena pembatasan masa jabatan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas dan bangunan yang didominasi oleh aset pribadi. Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan suatu bangunan sebagai Cagar Budaya tanpa rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas sehingga dana pelestarian tidak dapat dianggarkan untuk bangunan yang belum memiliki status sebagai Cagar Budaya.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Konservasi Bangunan, Kota Lama Banyumas

***JURIDICAL ANALYSIS OF BUILDING CONSERVATION POLICY IN THE
HISTORIC TOWN OF BANYUMAS***

By:

MUHAMMAD RAFLY FADILAH

E1A019016

ABSTRACT

Indonesia is a country that has tangible and intangible cultural heritage. One of the intangible cultural heritages is buildings. Nowadays, many historical building are being destroyed to be built into modern buildings, so their existence must be maintained and protected by the law. The building conservation policy aims to protect the environment which includes natural resources and artificial resources. This research is normative juridical and uses a statutory approach and conceptual approach to examine statutory regulations relating to Cultural Heritages. Data collection methods use interviews, observation and literature study. The data that has been collected is then analyzed qualitatively and presented in the form of narrative text.

Based on the results of research and discussion, the legal policies for building conservation in the Historic Town of Banyumas is realized through the designation of the Historic Town of Banyumas as protected area, building inventory activities in the Historic Town of Banyumas, the establishment of Cultural Heritage in the Historic Town of Banyumas and funding for the conservation of Cultural Heritage in the Historic Town of Banyumas. Historical buildings in the Historic Town of Banyumas have not been designated as Cultural Heritage because limitation the term of service of the Banyuma Cultural Heritahe Expert Team and most of the building are owned by private assets. The Regional Government cannot designate a building as Cultural Heritage without a recommendation from the Banyumas Cultural Heritahe Expert Team so that conservation funds cannot be budgeted for buildings that do not yet have Cultural Heritage status.

Keyword: Juridical Analysis, Building Conservation, Historic Town of Banyumas